

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

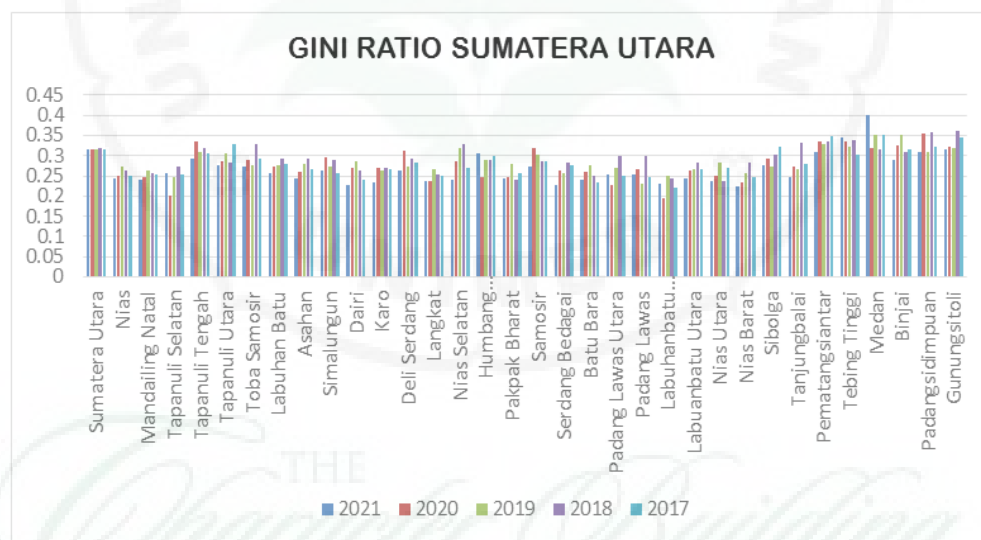
Pada umumnya, setiap negara di seluruh dunia memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan seluruh penduduknya dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Salah satu tantangan umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah perbedaan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah, disertai dengan tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah situasi di mana pendapatan nasional tidak tersebar secara merata di antara masyarakat Todaro (2011). Adanya Ketimpangan Distribusi pendapatan dapat menyebabkan permasalahan seperti kesulitan akses pendidikan bagi individu dengan sumber daya terbatas dan meningkatnya jurang pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketimpangan bukan tentang kekayaan saja, melainkan juga kesempatan terhadap aspek pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah dapat dengan melihat koefisien gini (gini ratio). Apabila nilai Indeks Gini mencapai 0 (nol) itu mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan sangat merata atau "kemerataan sempurna". Di sisi lain, jika nilai Indeks Gini mencapai 1 (satu), hal itu menunjukkan adanya "ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna.". Intinya, semakin tinggi nilai Indeks Gini

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam suatu negara tidak merata atau timpang. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Kriteria untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Dikatakan ketimpangan taraf rendah apabila Indeks Gini kurang dari 0,35, sedangkan ketimpangan taraf sedang apabila saat Indeks Gini berada dalam kisaran 0,35 hingga 0,5. Ketimpangan taraf tinggi apabila ketika Indeks Gini melebihi 0,5.

Grafik 1.1 Gini Ratio Sumatera Utara Periode 2017-2021.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

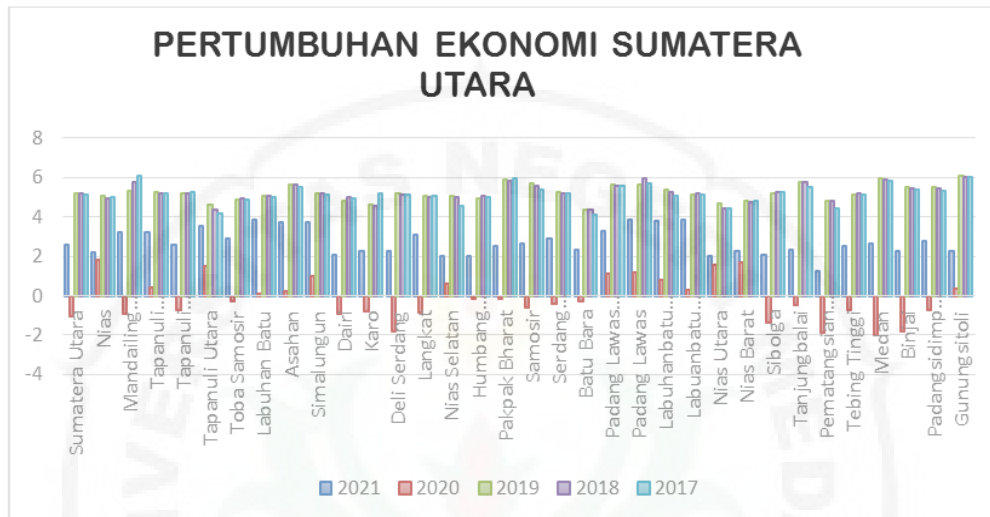
Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara bisa dilihat dari angka gini ratio. Dari grafik 1.1 dapat dilihat Ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami ketidakstabilan (naik turun) Daerah yang memiliki gini rasio tertinggi di provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2017-2021 adalah kota Medan, kabupaten Gunungsitoli, kabupaten Padang Sidempuan,

dan kota Binjai. Dimana di tahun 2021 gini rasio kota Medan mencapai 0.402, kabupaten kabupaten gunung sitoli juga mencapai 0.361 di tahun 2018. Begitu juga dengan kabupaten Padang Sidempuan pernah mencapai 0.359 pada tahun 2018 dan kota binjai mencapai 0.351 pada tahun 2019. Pada tahun 2018 angka gini ratio disumatera utara tercatat sebesar 0,3176 dan angka gini ratio tertinggi pada tahun 2018 berada di kabupaten Gunungsitoli angka gini ratio tercatat sebesar 0,3608. Periode selanjutnya angka gini ratio sumatera utara turun tercatat sebesar 0,3165 pada tahun 2019. kemudian pada tahun 2020 turun tercatat sebesar 0,3161, hingga pada tahun 2021 turun lagi mencapai 0,3145.

Ketimpangan pendapatan diberbagai wilayah bisa berasal dari pertumbuhan dan keterbatasan yang beragam di tiap wilayah, serta kecenderungan pembangunan yang fokus pada daerah-daerah yang telah berkembang. Inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan teradinya ketimpangan dalam suatu daerah, Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pemerataan pembangunan maka daerah yang terbelakang mengalami kemiskinan. Namun apabila pertumbuhan sebanding dengan pemerataan pembangunan ketimpangan tidak akan teradi (Todaro, Michael P & Smith, 2011: 283).

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara mengalami fluktuasi, terjadinya naik turun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berdasarkan grafik 1.2 diatas pertumbuhan ekonomi di setiap kab/ kota memiliki perbedaan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah dari Kabupaten Mandailing Natal dimana pada tahun 2017 mencapai 6.09%. Kemudian Kota Medan dimana pada tahun 2019 mencapai 5.93%. Namun Kota Medan juga tercatat memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang terendah di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2020 mencapai -1.98% kemudian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 Laju Pertumbuhan Ekonominya mencapai 4.11%. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi tercatat sebesar -1,07% dibandingkan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 5,22% tahun 2019. Kontraksi yang dialami terjadi karena menurunnya permintaan akibat terbatasnya daya beli masyarakat dan juga ekspor yang melambat. Hal ini karena meningkatnya Covid-19 sehingga masyarakat menahan konsumsi dan

cenderung untuk berjaga-jaga ditengan persainngan pada masa pandemic Covid-19. Kontraksi yang tinggi terdapat di Kota Medan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tercatat sebesar -1,98%. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak dapat menangani masalah dari ketidakmerataan pembangunan. Hal ini terjadi karena ada beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Wilayah-wilayah ini tidak mengalami kemajuan yang seragam, dan penyebabnya adalah kekurangan sumber daya yang tersedia.

Pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama di kawasan perkotaan yang lebih maju, menyebabkan banyak penduduk yang berusia produktif memilih untuk bersekolah di perkotaan demi mengejar pendidikan. Akibatnya, daerah asal mereka akan mengalami kekurangan penduduk berkualitas, dan ini akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar daerah yang akan terjadi secara bertahap. Penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam sumber daya yang tersedia dan perkembangan infrastruktur pendidikan yang lebih maju.

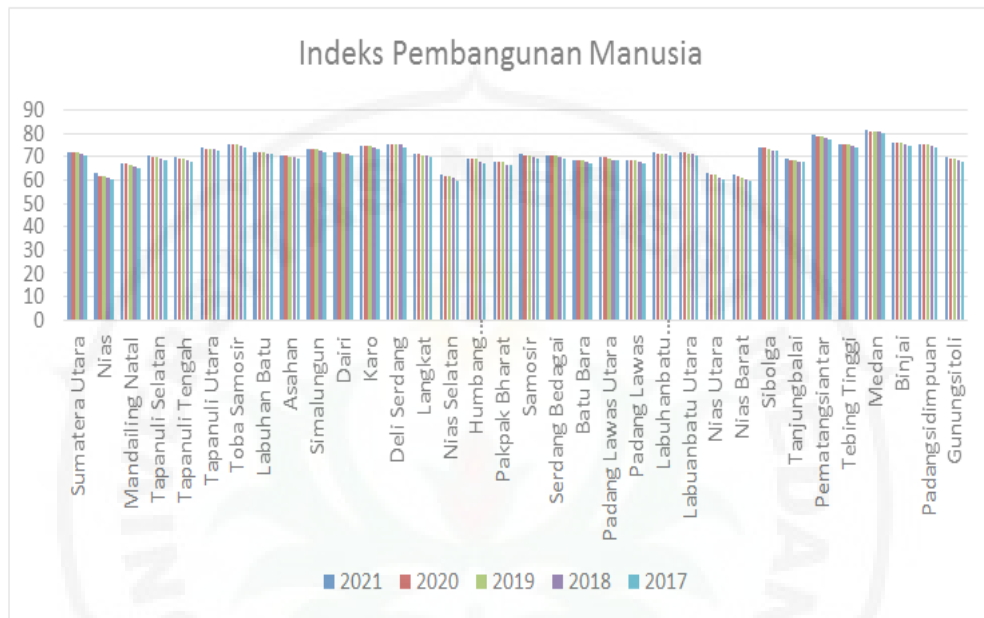
Tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat dapat dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Indeks Pembangunan Manusia terbentuk melalui tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, standar hidup layak. Pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan besaran gaji dan memberikan kontribusi yang besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula status pekerjaan yang akan

dimiliki. Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia serta memiliki dampak pada produktivitas penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah dan berkontribusi pada upaya pembangunan daerah. Pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin meningkat juga produktivitasnya. Akibatnya, kemungkinan besar mereka akan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi dan menghasilkan hasil kerja yang baik. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dan meminimalisir risiko terperosok ke dalam kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia pada setiap daerah tentu berbeda-beda tergantung dengan bagaimana daerah itu meningkatkan IPM atau sumber daya manusia yang dimiliki di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di setiap daerah itu berbeda juga. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara IPM di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara berbeda-beda namun secara keseluruhan IPM di kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**Grafik 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara
2017-2021**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari grafik 1.3 diperoleh bahwa tingkat IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi. Namun untuk daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan IPM sebesar 81.21 di tahun 2021. Dan untuk yang terendah adalah Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 59,56 pada tahun 2018. Berdasarkan buku BPS 2015 IPM berada di < 60 yang berarti di daerah tersebut memiliki tingkat IPM yang rendah. Hal itu berarti tingkat IPM di Kabupaten Nias Barat tergolong IPM yang rendah. Indeks pembangunan manusia 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ketidakmerataan tingkat IPM menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, ada daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ada pula daerah yang SDM nya masih

tergolong rendah. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM) maka semakin tinggi pula produktivitas penduduk sehingga pendapatan akan semakin meningkat, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berdampak pada pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Becker (dalam Suryani & Woyanti., 2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

Ada tiga indikator yang menjadi perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar kehidupan, ketiga faktor ini saling berpengaruh satu sama lain. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah perlu memperhatikan tiga unsur tersebut. Selain itu, faktor-faktor pendukung lainnya, seperti peluang pekerjaan, sarana infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, juga harus diperhatikan.

Berdasarkan serangkaian masalah yang muncul dari data empiris, teoritis dan fenomena yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan dalam sub latar belakang diatas, sehingga disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dan menurun cukup drastis pada tahun 2020.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami Kenaikan
4. Terdapat beberapa factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari tidak berfokusnya penelitian ini pada permasalahan dan penafsiran yang terlalu luas maka dilakukan pembatasan pada masalah. Dengan latar belakang permasalahan diatas, sehingga permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Data gini ratio digunakan sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan melihat data yang bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Utara dari periode 2017 sampai 2021.
3. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) (Y), dan variabel independen

yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2).

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan identifikasi masalah, sehingga peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, permasalahan dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang telah di sesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan. Penelitian ini diharapkan agar keputusan pemerintah yang dibuat bisa mengatasi masalah-masalah dalam pembangunan , salah satunya ketimpangan pendapatan.
2. Bagi pembaca, diharapkan bisa digunakan sebagai panduan referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.